

Berita Klaten: Semoga Bermanfaat Bagi Masyarakat

Sejahterakan Anggota, CU Kridha Rah:

Beranda > Opini >

Meninjau Ulang Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Warta Kita
Mei 24, 2024

(doc. educational development consultant)

PENDIDIKAN Tinggi di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius.

Tulisan dalam rubrik opini Kompas tanggal 3 Mei 2024 oleh Ahmad Najib Burhani menarik untuk direfleksikan lebih lanjut.

Sengkarut dalam dunia akademik, khususnya Pendidikan Tinggi di Indonesia yang pertama adalah mengenai berbagai perhitungan atau metrik. 

Metrik akademik telah menjadi tujuan utama, bukan lagi sebagai alat evaluasi. Perguruan Tinggi berlomba-lomba untuk mencapai peringkat tinggi melalui jumlah publikasi dan sitasi, seolah-olah metrik ini adalah satu-satunya ukuran keberhasilan.

Akibatnya, esensi pendidikan itu sendiri, yaitu pengembangan pengetahuan dan karakter, terpinggirkan. Pendidikan menjadi sebuah perlombaan angka yang mengabaikan kualitas dan makna sejati dari proses belajar.

Selanjutnya, fenomena tersebut diperparah oleh komersialisasi dan industrialisasi pendidikan. Pendidikan Tinggi semakin dilihat sebagai komoditas yang diperjualbelikan, mengesampingkan hak fundamental setiap individu untuk mengaksesnya.

Riset dan publikasi akademik tidak lagi murni berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan pada potensi keuntungan finansial yang pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran bahwa orientasi pendidikan dan penelitian lebih kepada aspek komersial daripada kontribusi nyata terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Kebijakan insentif publikasi yang diterapkan saat ini juga menunjukkan “efek kobra”. Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas ilmiah justru menciptakan praktik “salami slicing”, di mana peneliti membagi hasil penelitian mereka menjadi beberapa publikasi kecil demi memenuhi target kuantitatif. Praktik ini tidak hanya merusak integritas akademik tetapi juga menurunkan kualitas



Ketiga isu dalam dunia akademik tersebut ternyata belum cukup, baru-baru ini berita mengenai kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) semakin menambah beban finansial bagi mahasiswa dan keluarganya.

Protes mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi telah banyak mengisi kolom pemberitaan. Memang terkesan ada hal yang kurang wajar terkait dengan kenaikan UKT yang cukup *signifikan*, bahkan hanya dibandingkan dengan semester lalu.

Biaya pendidikan yang semakin mahal berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pendidikan Tinggi yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial, kini semakin sulit diakses oleh mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini bertentangan dengan tujuan dasar Pendidikan Tinggi untuk menyediakan kesempatan yang setara bagi semua individu.

Ketika aksi protes kenaikan UKT tersebut semakin massif terdengar di pemberitaan, muncul pernyataan dari Pelaksana Tugas Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Tjahtjandarie, bahwa Pendidikan Tinggi masih dianggap sebagai kebutuhan tersier.

Pernyataan tersebut mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak, termasuk DPR. Pandangan ini mencerminkan masih rendahnya penghargaan terhadap Pendidikan Tinggi sebagai fondasi penting dalam pembangunan bangsa.

Dalam era pengetahuan seperti sekarang, Pendidikan Tinggi seharusnya dianggap sebagai kebutuhan primer yang mendukung inovasi, teknologi, dan kemajuan sosial-ekonomi. Jika Pendidikan Tinggi terus



dianggap sebagai kebutuhan tersier, Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menjamin keberlanjutan, utamanya dalam menjalankan peran utamanya untuk menciptakan generasi yang berdaya saing. Oleh karenanya untuk memperbaiki situasi ini, langkah-langkah nyata harus segera diambil.

Dalam ranah birokrasi internal, khususnya bagi dosen dengan pelaksanaan Tri Dharma-nya, maka fokus Pendidikan Tinggi harus kembali kepada pengembangan pengetahuan dan karakter, bukan sekadar pencapaian metrik. Evaluasi kinerja akademik harus mencerminkan kualitas dan relevansi, bukan sekadar kuantitas.

Komersialisasi pendidikan perlu dikendalikan agar penelitian akademik tetap independen dan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan insentif publikasi harus dievaluasi ulang untuk menghindari “efek kobra” dan memastikan kualitas penelitian.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan mahasiswa, kenaikan biaya UKT harus dikendalikan dengan peningkatan beasiswa dan dukungan finansial untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Memang menjadi dilema tersendiri bagi PTN yang selama ini banyak dibiayai oleh pemerintah. Namun hal tersebut masih bisa diupayakan dengan menambah penghasilan mandiri bagi PTN melalui pengadaan lembaga sertifikasi relevan, mengikuti hibah baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal penting selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah kesepakatan dan penyamaan persepsi bagi seluruh masyarakat bahwa Pendidikan Tinggi harus diperlakukan sebagai kebutuhan primer dengan memperluas akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, Pendidikan Tinggi di Indonesia dapat kembali ke jalur yang benar, berkontribusi secara *signifikan* pada pembangunan bangsa, dan menghasilkan generasi yang kompeten serta berdaya saing global. Perubahan paradigma dan kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa Pendidikan Tinggi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memberikan pendidikan yang bermakna dan berkualitas bagi semua.





Januari Ayu Fridayani

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Editor: L Sukamta

SEBARKAN

Pos sebelumnya
Tingkatkan Kualitas Pendidikan Dan Riset, UWM
Yogyakarta Jalin Kerjasama Dengan Thai-Nichi Institute

POS TERKAIT

